

Unit No	Area / Unit		Arah Hadap Kavling	Harga (Rp)
	Land	Build		
40	251	225	Timur-Utara	9.900.000.000
41*	252	225	Timur-Utara	10.900.000.000

*Unit 41 termasuk:
- Fully Furnished by Vivere
- Landscape Taman

01-Sep-23


HARGA JUAL Termasuk :

- 1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 2 Biaya penyambungan daya listrik (6.600 VA)
- 3 Biaya penyambungan telepon/internet 1 unit
- 4 Smart Home System sesuai spesifikasi
- 5 PPN 11% (apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)

HARGA JUAL Tidak Termasuk :

- 1 Biaya akad kredit, AJB dan Balik Nama Sertifikat HGB ke atas nama pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3 Pajak-pajak lain yang ditetapkan oleh Pemerintah
- 4 Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu oleh penjual atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan
- 5 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 6 Biaya pemakaian, aktivasi dan balik nama listrik dan telepon ke atas nama pembeli
- 7 Biaya-biaya KPR

TATA CARA PEMBAYARAN

A) UANG TANDA JADI (UTJ) : Rp 50.000.000

B) OPSI PELUNASAN :

1) TUNAI KERAS

Down Payment (DP) : 20% - UTJ Hari ke-14 setelah UTJ
Pelunasan : 80% Hari ke-30 setelah pembayaran DP

2) KPR EXPRESS

Angsuran (DP) : 20% - UTJ Hari ke-14 setelah UTJ
Pelunasan : Akad Kredit (80%) Hari ke-30 setelah pembayaran DP

CATATAN :

- 1 Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- 2 Transaksi batal apabila dalam waktu 14 hari sejak UTJ tidak ada realisasi pembayaran lagi dan UTJ hangus
- 3 Untuk cara pembayaran KPR, besarnya suku bunga saat akad kredit dilakukan ditentukan oleh bank penyedia KPR yang berlaku pada saat akad kredit dilakukan
- 4 Ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan KPR tergantung pada regulasi/kebijakan Bank penyedia KPR
- 5 Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPR diluar tanggung jawab pengembang